**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA**

# LAPORAN KINERJA

# (LAKIN)

## TAHUN 2024

**DAFTAR ISI**


Daftar isi ..... 2

Kata Pengantar ..... ..... 3

Ikhtisar Eksekutif ..... 4

BAB I PENDAHULUAN ..... 6

I. Latar Belakang..... 6

II. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 9

III. Sistematika Laporan..... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA …….....…….. 11

I. Perencanaan Strategis..... 11

II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024……...… 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…….. 15

I. Capaian Kinerja Organisasi…… 15

II. Realisasi Anggaran…… 96

III. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…… 96

IV. Kinerja Lain-Lain…… 98

BAB IV PENUTUP ..... 101

Lampiran …….. 100

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIN Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan visi dan misi dalam mengemban tugas operasional Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

LAKIN dimaksudkan sebagai alat kendali, penilai kerja secara kuantitatif dan transparan untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap instansi pemerintah pada umumnya, dan terlebih khusus Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Di samping itu LAKIN dimaksudkan juga sebagai umpan balik dan alat pendorong motivasi dalam meningkatkan semangat dan prestasi kerja untuk perbaikan kinerja di masa depan.

Semoga laporan singkat dan sederhana ini bermanfaat sesuai maksud dan tujuannya.

Mataram, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara

Ditandatangani secara elektronik
Samingun

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara tahun 2022 didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

LAKIN tingkat Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya LAKIN merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabel dan pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan sistematika laporan yang diawali dengan Ikhtisar Eksekutif yang menjelaskan secara singkat LAKIN Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dilanjutkan dengan Bab I, Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II, Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024. Bab III, Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran. Diakhiri dengan Bab IV, Penutup, yang menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, dijelaskan pula data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku melalui kantor-kantor operasional dibawahnya (KPP Pratama dan KP2KP). Namun dalam menjalankan mandat tersebut terdapat kendala di lapangan berupa sebaran wilayah kerja yang sangat luas yang meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbatasnya jumlah SDM serta sebaran kualitas SDM yang tidak merata di tingkat KPP.

Mengatasi kendala tersebut tentu perlu terus dilakukan dengan upaya yang lebih cerdas serta mengevaluasi kinerja, program kinerja dan kinerja kebijaksanaan dengan harapan agar terciptanya *good governance* di Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara beserta unit operasional dibawahnya yang disusun melalui LAKIN ini.

Mataram, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara

Ditandatangani secara elektronik
Samingun

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, Kanwil DJP NTB dan NTT menjadi Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan bertempat kedudukan di Mataram.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, berlaku sejak 1 Desember 2008, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara terdiri atas kantor-kantor operasional sebagai berikut:

1) 11 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
    a) KPP Pratama Mataram Barat
    b) KPP Pratama Mataram Timur
    c) KPP Pratama Praya
    d) KPP Pratama Raba Bima
    e) KPP Pratama Sumbawa Besar
    f) KPP Pratama Kupang
    g) KPP Pratama Atambua
    h) KPP Pratama Maumere
    i) KPP Pratama Ende
    j) KPP Pratama Ruteng
    k) KPP Pratama Waingapu
2) 11 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
    a) KP2KP Selong
    b) KP2KP Gerung
    c) KP2KP Taliwang

d) KP2KP Dompu

e) KP2KP Kalabahi

f) KP2KP Ba'a

g) KP2KP Soe

h) KP2KP Larantuka

i) KP2KP Bajawa

j) KP2KP Labuhan Bajo

k) KP2KP Waikabubak

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara terdiri dari gugus kepulauan sejumlah 1.572 pulau dengan 9 pulau besar yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang setiap daerah memiliki beragam adat kebudayaan, kekayaan alam dan keindahan wisatanya tersendiri.

Kanwil DJP Nusa Tenggara memiliki luas wilayah kerja sebesar 68.097 $km^2$ dengan total penduduk sejumlah 11.129.355 jiwa yang terbagi menjadi 2 provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 421 pulau, 39 pulau berpenghuni. Dua pulau besar di provinsi NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa
2) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau memiliki nama, dan 44 pulau berpenghuni, Tujuh pulau besar di provinsi NTT yaitu pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.

Mandat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara adalah menghimpun penerimaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dan untuk dapat terealisasinya mandat tersebut Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara senantiasa memberikan bimbingan dan pengawasan kepada unit-unit kerja di bawahnya (KPP Pratama dan KP2KP) yang merupakan kantor-kantor operasional. Peran dari kantor-kantor operasional sangat strategis karena instansi tersebut langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, mayoritas sektor utama mencatat pertumbuhan positif, baik bruto maupun neto namun, sektor konstruksi mengalami kontraksi pada pertumbuhan neto, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pemulihan penuh sektor ini. Pada Januari sampai dengan Desember tahun 2024, tiga sektor dengan kontribusi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah administrasi pemerintah dengan kontribusi Rp 1624,86 M (34,52%), diikuti Pertambangan dengan kontribusi Rp 885.42 M (18,81%), dan sektor perdagangan dengan kontribusi Rp 589,82 M (12,35%). Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor Pengadaan Listrik dengan kontribusi sebesar Rp 153,43 M dengan persentase sebesar 85.76%.

Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mayoritas utama mencatat pertumbuhan positif, baik bruto maupun neto. Namun, sektor administrasi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada Januari sampai dengan Desember tahun 2024, tiga sektor dengan kontirbusi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintah (52,69%), diikuti perdagangan (15,46%) dan Jasa Keuangan (11,29%). Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor real estate, dengan Persentase sebesar 146,27%, yang disebabkan oleh adanya pembayaran PPh Final atas penjualan properti. Sektor Administrasi Pemerintah tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebesar Rp 1,745.11 M (52,69% dari total penerimaan), Namun, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 3.95% dalam pertumbuhan.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah UMKM atau Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PP 23/2018 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lemah.

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi akibat kebijakan pembatasan terhadap ruang gerak publik yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah seluruh dunia. Kebijakan ini tentu berdampak buruk terhadap perekonomian secara global yang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang dan pada akhirnya berdampak pada sektor UMKM. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, salah satunya melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah

yang cukup menjadi angin segar bagi Wajib Pajak. Ditambah lagi pada tahun 2022, Wajib Pajak yang memiliki omzet tidak lebih dari 500 juta rupiah setahun tidak dikenakan PPh Final 0,5%.

Hal tersebut tentu berdampak pula terhadap UMKM yang berada di wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara. Seiring pulihnya keadaan ekonomi pasca meredanya pandemi Covid-19, pembayaran pajak PP 23/2018 mengalami kenaikan ditahun 2021 namun turun pada tahun 2022 setelah batasan kena pajak bagi WP UMKM dinaikkan, dapat diketahui bahwa pembayaran pajak PP 23/2018 tahun 2020 sebesar Rp. 57.651.892.517, tahun 2021 sebesar Rp. 57.265.998.330, tahun 2022 sebesar Rp. 57.647.374.504, tahun 2023 sebesar Rp. 56.233.112.798, tahun 2024 64.940.643.086.

**II. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan fungsi dan peran sesuai Rencana Strategis Kanwil yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai target yang ditetapkan, Kanwil DJP Nusa Tenggara membuat rencana kerja tahunan dan mencari cara-cara baru (inovasi) dalam pencapaiannya. Mengingat tugas dan fungsinya yang kompleks, diperlukan fokus dan prioritas dalam pelaksanaannya, dengan melibatkan unit kerja dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, serta selalu berupaya untuk selalu menjaga kesinambungan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan meningkatkan *tax ratio*, menjaga rasio utang pemerintah dan juga defisit anggaran.

Kondisi geografis dan karakteristik wilayah kerja yang terdiri dari gugusan pulau dan memiliki kontur pegunungan dan perbukitan merupakan tantangan tersendiri bagi unit-unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Kondisi geografis tersebut menjadi kendala dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja lain, dan juga menjadi salah satu faktor kurang

maksimalnya upaya yang dilakukan dalam penggalian potensi pajak dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

## II. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

   Dalam bab ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisarPK tahun 2024.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

   Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

4. **Bab IV Penutup**

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## I. Perencanaan Strategis

### 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah *Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"*. Dengan demikian tuntutan menjadi penghimpun pajak negara yang terbaik pada Tingkat Nasional merupakan suatu hal yang tidak terelakkan lagi, perlu kerja cerdas dan kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan visi tersebut.

### 2. Misi Direktorat jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan/eksistensi, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah*:*

1. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan*

*bermotivasi.*

Dari misi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, disiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. Dipastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

## II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### 1. Penetapan Kinerja

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mendapat amanah untuk menghimpun penerimaan pajak tahun 2024 dengan kondisi sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Target* | Realisasi Netto* | Persentase |
|---|---|---|---|
| PPh Non Migas | 4.458,40 | 4.500,59 | 100,95% |
| PPN dan PPnBM | 3.013.08 | 3.009,03 | 99,87% |
| PBB | 375,75 | 380,09 | 101,16% |
| PPh DTP | 0 | 0,00 | - |
| Pajak Lainnya | 136,12 | 143,89 | 105,71% |
| **Jumlah** | **7.983,36** | **8.033,61** | **100,63%** |

*dalam miliar rupiah

*Sumber: Apportal DJP per-tanggal 30 Januari 2025*

Untuk dapat tercapainya rencana penerimaan pajak tersebut telah diambil langkah-langkah antara lain berupa:

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Perpajakan;

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
3. Intensifikasi Perpajakan;
4. Peningkatan *Law Enforcement*;
5. Ekstensifikasi Perpajakan;
6. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM;
7. Pengelolaan Anggaran yang Efektif; dan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

### 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen pimpinan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai dituangkan dalam kontrak kinerja.

Perjanjian kinerja awal tahun 2024 Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara sebagai berikut.

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-N | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4. | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif | 04a-CP | Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan | 100% |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6. | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 6b-N | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu | 100% |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian | 100% |
| | | 07b-CP | Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi | 90% |
| 8. | Penanganan upaya hukum yang efektif | 08a-CP | Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu | 86.5% |
| | | 08b-N | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | 63% |
| 9. | Data dan Informasi yang berkualitas | 09a-N | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% |
| | | 09b-N | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 10. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 10a-N | Tingkat kualitas kompetensi SDM | 90 |
| | | 10b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 100% |
| | | 10c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 11. | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## I. Capaian Kinerja Organisasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,63% | 100.63 |
| | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 104,92 | 104,92 |
| Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,60% | 100,60 |
| | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 121,57% | 120,00 |
| Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 101,00% | 101,00 |
| Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | 120,00 |
| | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan | 100,00 | 109,45 | 109,45 |
| Pengawasan pembayaran masa yang efektif | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 118,96% | 120,00 |
| Pengujian kepatuhan material yang efektif | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| Penegakan hukum yang efektif | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| | Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi | 90,00% | 110,65% | 120,00 |
| Penanganan upaya hukum yang efektif | Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu | 86,50% | 99,30% | 114,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | 63,00% | 97,20% | 120,00 |
| Data dan Informasi yang berkualitas | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 89,03% | 120,00 |
| Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM | 90,00 | 114,37 | 120,00 |
| | Indeks Penilaian Integritas Unit | 100,00 | 113,22% | 120,00 |
| | Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko | 90,00% | 97,49 | 108,32 |
| Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | 120,00 |

*Sumber: Laporan NKO Kanwil DJP Nusra Triwulan IV Tahun 2024*

1. **Persentase realisasi penerimaan pajak**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 17,00% | 42,00% | 42,00% | 73,00% | 73,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 15,89% | 42,73% | 42,73% | 67,37% | 67,37% | 100,63% | 100,63% |
| Capaian | 93,47% | 101,74% | 101,74% | 92,29% | 92,29% | 100,63% | 100,63% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar

Pengembalian Pendapatan (SPMPP).Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

| Formula | |
|---|---|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}}$ | x 100% |

- **Realisasi IKU**

Rencana penerimaan pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara tahun 2024 sebesar Rp. 7.983.359.345.000 Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara sampai Desember 2024 adalah Rp. 8.390.966.901.492 atau 100,63% dengan pertumbuhan bruto sebesar 13,09% dengan rincian sebagai berikut:

| No. | KPP Pratama | Rencana Penerimaan | Realisasi 2024 | Realisasi 2024 | Capaian | Pertumbuhan Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6= 4/3* | |
| 1 | Sumbawa Besar | 1.553.908.660.000 | 1.640.713.074.471 | 858.644.290.128 | 100,74% | 16,91% |
| 2 | Atambua | 251.922.025.000 | 291.128.789.004 | 248.590.522.445 | 100,81% | 5,04% |
| 3 | Ende | 253.613.189.000 | 263.633.036.842 | 224.491.077.785 | 100,33% | 6,00% |
| 4 | Raba Bima | 405.048.297.000 | 407.774.911.511 | 303.615.825.456 | 100,52% | 8,30% |
| 5 | Maumere | 326.529.297.000 | 338.751.542.251 | 272.173.421.730 | 100,58% | 15,32% |
| 6 | Ruteng | 449.074.139.000 | 465.869.632.186 | 425.800.712.788 | 100,37% | 2,59% |
| 7 | Mataram Timur | 443.503.119.000 | 484.999.238.078 | 426.225.915.488 | 100,21% | -2,90% |
| 8 | Waingapu | 303.539.115.000 | 325.021.922.969 | 299.793.114.890 | 100,26% | 6,54% |
| 9 | Praya | 598.864.333.000 | 633.451.672.119 | 417.851.113.461 | 101,02% | 32,53% |
| 10 | Kupang | 1.719.188.387.000 | 1.780.757.367.092 | 1.463.072.724.304 | 100,50% | 7,30% |
| 11 | Mataram Barat | 1.678.168.784.000 | 1.758.865.714.969 | 1.467.838.571.120 | 100,81% | 23,52% |
| Jumlah | | 7.983.359.345.000 | 8.390.966.901.492 | 6.403.854.558.699 | 100,63% | 13,09% |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 92,43% | 99,11% | 133,22% | 106,04% | 100,63% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Tren Penerimaan pajak mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 mencapai 99,11%, 2022 mencapai 133,22%, 2023 mencapai 106,04% dan 2024 100,63%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,63% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100 | 100,63% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. mengadakan pemantauan dan evaluasi untuk membantu KPP dalam mencapai target yang telah ditetapkan,
  2. mengadakan forum dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam pengglian potensi demi tercapainya penerimaan pajak,
  3. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terutama DJPB dan BUD untuk mendapatkan PAGU anggaran satker,
  4. menyusun strategi pengawasan dalam rangka upaya pengamanan target penerimaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
     - tercapainya target penerimaan Kanwil DJP Nusa Tenggara sebesar 100,63%,
     - sinergi antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan instansi pemerintah terutama terkait data pagu anggaran dan real-time

realisasi pagu. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

b. Kegagalan
    - keterlambatan dalam verifikasi dan pencairan dana pagu anggaran,
    - karakteristik Wajib Pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara (khususnya Wajib Pajak instansi pemerintah) dimana penyerapan anggaran akan tumbuh signifikan di triwulan IV yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan di tahun berikutnya,
    - pengendalian restitusi yang belum optimal di awal tahun.

- **Rencana aksi ke depan**

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja penerimaan, kepatuhan, dan pengawasan secara berkala;
b. Memastikan yang dilakukan oleh setiap proses bisnis sesuai atau sejalan dengan strategi pengamanan penerimaan, dan kebijakan teknis yang telah ditentukan;
c. Melakukan pembenahan Basis Data Masterfile, Penambahan WP terdaftar dan Perluasan Objek Pajak
d. Melakukan pembenahan Basis Data Masterfile, Penambahan WP terdaftar dan Perluasan Objek Pajak
e. Menerbitkan dan mengirimkan resume kinerja penerimaan per KPP setiap bulan sebagai bahan evaluasi dan monitoring dari Kanwil kepada KPP
f. Melakukan Manajemen Restitusi dalan pemeriksaan permohonan Lebih Bayar.

2. **Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 101,92 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 104,92 | 104,92 |
| Capaian | 101,92% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 104,92% | 104,92% |

*Sumber: Laporan NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- **Formula IKU**

| Formula |
|---|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas) |

- **Realisasi IKU**

  Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi penerimaan kas s.d. 31 Desember 2024 adalah 104,92% Trajectory IKU 1b-N s.d. Triwulan IV 2024 adalah 100, sehingga capaian IKU sebesar 104,92%, dengan rincian sebagai berikut:

| Unit Kerja | Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto | | | Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas | | | | | Realisasi IKU Gabungan | Trajectory | Indeks Capaian IKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Komponen Unit Kerja | Komponen Nasional | Realisasi IKU | Prognosa | Realisasi | Deviasi (bulan 1-12) | Deviasi s.d. TW 4 | Realisasi IKU | | | |
| A | B | C | D=(40% x B) +(60%xC) | E | F | G | H | I | J=(D x 50%)+(I x 50%) | K | L=J x K |
| MATARAM BARAT | 123,52% | 117,62% | 118,57% | 1.601,23 | 1.691,83 | 7,14% | 7,14% | 100,00% | 109,29% | 100 | **109,29** |
| RABA BIMA | 108,30% | 103,12% | 105,19% | 405,56 | 407,16 | 7,27% | 7,27% | 100,00% | 102,60% | 100 | **102,60** |
| SUMBAWA BESAR | 116,91% | 111,32% | 113,56% | 1.546,83 | 1.565,43 | 3,99% | 3,99% | 110,00% | 111,78% | 100 | **111,78** |
| MATARAM TIMUR | 97,10% | 92,46% | 94,32% | 428,86 | 444,45 | 10,52% | 10,52% | 90,00% | 92,16% | 100 | **92,16** |
| PRAYA | 132,53% | 126,20% | 120,00% | 591,48 | 605,00 | 10,91% | 10,91% | 90,00% | 105,00% | 100 | **105,00** |
| MAUMERE | 115,32% | 109,81% | 112,01% | 326,38 | 328,41 | 12,28% | 12,28% | 80,00% | 96,01% | 100 | **96,01** |
| KUPANG | 107,30% | 102,17% | 104,22% | 1.625,58 | 1.727,82 | 10,20% | 10,20% | 90,00% | 97,11% | 100 | **97,11** |
| ENDE | 106,00% | 100,93% | 102,96% | 246,61 | 254,46 | 9,33% | 9,33% | 90,00% | 96,48% | 100 | **96,48** |
| RUTENG | 102,59% | 97,69% | 99,65% | 452,15 | 450,75 | 9,44% | 9,44% | 90,00% | 94,83% | 100 | **94,83** |
| ATAMBUA | 105,04% | 100,02% | 102,03% | 252,86 | 253,97 | 13,28% | 13,28% | 80,00% | 91,02% | 100 | **91,02** |
| WAINGAPU | 106,54% | 101,45% | 103,49% | 301,34 | 304,34 | 7,66% | 7,66% | 100,00% | 101,75% | 100 | **101,75** |
| **KANWIL DJP NUSRA** | **113,09%** | **107,68%** | **109,84%** | **7.778,88** | **8.033,62** | **4,96%** | **4,96%** | **100,00%** | **104,92%** | **100** | **104,92** |

*Sumber: Mandor-DJP siakses pada 16 Januari 2025*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | -126,07% | 107,05% | 90,54% | 114,14 | 104,92 |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Pertumbuhan Bruto Kanwil DJP Nusa Tenggara sebesar 13,09% di atas pertumbuhan Nasional yang sebesar 7,68% Total Realisasi IKU Pertumbuhan Pajak Bruto sebesar 109,84% dan Realisasi IKU Persentase Deviasi Akurasi perencanaan Kas sebesar 100%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | - | 100,00 | 104,92 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | - | 104,92 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. 'mengadakan pemantauan dan evaluasi untuk membantu KPP dalam mencapai target yang telah ditetapkan,
  2. mengadakan forum dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam pengglian potensi demi tercapainya penerimaan pajak,
  3. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terutama DJPB dan BUD untuk mendapatkan PAGU anggaran satker,
  4. menyusun strategi pengawasan dalam rangka upaya pengamanan target penerimaan,
  5. membantu KPP dalam memperhitungkan prognosa bulanan dengan memberikan gambaran perhitungan prognosa rerata 5 tahun masing-masing KPP yang disampaikan melalui Whatsapp Group

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

IKU prognosa mencapai 100%, dan pertumbuhan bruto Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara melebihi pertumbuhan nasional dengan angka 13,09%,

b. Kegagalan IKU prognosa tidak dapat mencapai 110% seperti tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya anomali pada Triwulan I dan II dalam perhitungan prognosa sebagian KPP.Mengirimkan perhitungan prognosa tiap bulan setiap tanggal 16 kepada Kepala Seksi PKD di KPP sebagai bahan perbandingan dalam perhitungan prognosa bulan tersebut.

- **Rencana aksi ke depan**

a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas kinerja penerimaan, salah satunya melalui penerbitan dan pengiriman resume kinerja penerimaan ssetiap bulan untuk setiap KPP;

b. Memastikan yang dilakukan oleh setiap proses bisnis sesuai atau sejalan dengan strategi pengamanan penerimaan, dan kebijakan teknis yang telah ditentukan;

c. Meningkatkan peran dan fungsi komite kepatuhan kanwil dan KPP; Mengirimkan data perhitungan prognosa bulanan tiap KPP menurut perhitungan Kanwil setiap bulan, sebagai bahan pertimbangan KPP dalam menginput angka prognosa bulanan;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas capaian persentase deviasi akurasi.

e. Dilakukan *sharing session* cara perhitungan prognosa dari KPP yang capaian deviasi prognosa Triwulan IInya bagus

**3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 17,00% | 42,00% | 42,00% | 73,00% | 73,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 15,50% | 42,12% | 42,12% | 68,86% | 68,86% | 100,60% | 100,60% |
| Capaian | 91,18% | 100,29% | 100,29% | 94,33% | 94,33% | 100,60% | 100,60% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

| Formula | |
|---|---|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}$ | x 100% |

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Penerimaan PPM s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.414,94 Miliar atau mencapai 100,60% dari target PPM tahun 2024 (ND-6761/WPJ.31/2024).

Trajectory IKU s.d. Triwulan IV 2024 adalah 100% sehingga capaian IKU sebesar 100,60%

| Unit Kerja | Target | Realisasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | Capaian | Pertumbuhan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6=3-4)/3 |
| MATARAM BARAT | 1.542.141.373.000 | 1.555.683.700.821 | 1.348.467.424.761 | 100,88% | 15,37% |
| RABA BIMA | 361.045.734.000 | 363.128.319.836 | 353.495.357.975 | 100,58% | 2,73% |
| SUMBAWA BESAR | 1.509.873.226.000 | 1.520.801.557.217 | 1.287.454.195.364 | 100,72% | 18,12% |
| MATARAM TIMUR | 395.371.313.000 | 395.861.120.529 | 432.847.244.024 | 100,12% | -8,54% |
| PRAYA | 535.243.184.000 | 536.929.726.734 | 428.829.938.063 | 100,32% | 25,21% |
| MAUMERE | 295.936.850.000 | 297.815.012.237 | 260.786.871.922 | 100,63% | 14,20% |
| KUPANG | 1.583.675.337.000 | 1.592.070.348.159 | 1.502.327.918.906 | 100,53% | 5,97% |
| ENDE | 237.708.501.000 | 238.472.010.053 | 230.949.196.063 | 100,32% | 3,26% |
| RUTENG | 412.427.559.000 | 414.076.514.424 | 405.148.536.074 | 100,40% | 2,20% |
| ATAMBUA | 229.081.098.000 | 231.014.646.061 | 228.047.064.991 | 100,84% | 1,30% |
| WAINGAPU | 271.308.028.000 | 272.088.211.634 | 275.558.026.885 | 100,29% | -1,26% |
| **Grand Total** | **7.373.812.203.000** | **7.417.941.167.705** | **6.753.911.775.028** | **100,60%** | **9,84%** |

*Sumber: Aplikasi DRM diakses 16 Januari 2025*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 96,63% | 137,98% | 107,63% | 100,60% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100% | 100,00% | 100,60% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100 | 100,60% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terutama DJPB dan BUD untuk mendapatkan PAGU anggaran satker.
  2. Melakukan perhitungan potensi pajak dari PAGU APBN, APBD, dan Dana Desa.
  3. Menyusun strategi pengawasan dalam rangka upaya pengamanan target penerimaan.
  4. Monitoring Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan Pemda Untuk Semester II Tahun 2024.
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas kinerja penerimaan, kepatuhan, dan pengawasan WP kewilayahan.
  6. Berkoordinasi dengan KPP dan memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  a. Keberhasilan:

sinergi antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan instansi pemerintah terutama terkait data pagu anggaran dan real-time realisasi pagu

b. kegagalan:

Keterlambatan dalam verifikasi dan pencairan dana pagu anggaran. Karakteristik Wajib Pajak di Kanwil DJP Nusa Tenggara (khususnya Wajib Pajak instansi pemerintah) dimana penyerapan anggaran tumbuh signifikan di triwulan IV yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan di tahun berikutnya dengan pencapaian realisasi sebesar 121,57%. Hal ini menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan PPM.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Membuat usulan target untuk PPM Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan;
2. Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai yang ditampilkan di dashboard atau sistem;
3. Berkoordinasi dengan dan Dit. EP untuk pembagian target Strategis dan Kewilayahan;
4. Koordinasi secara intensif dengan KPP, Dit. DIP dan Kanwil DJPB terkait Pagu anggaran satker termasuk dana desa;
5. Menurunkan evaluasi realisasi anggaran Tahun 2024;
6. Melaksanakan kegiatan sesuai arah kebijakan pengawasan Nasional dari Dit. EP.

- **Rencana Aksi ke depan**

1. Pengawasan pembayaran dan pelaporan atas seluruh WP Strategis, dan WP Kewilayahan ;
2. Monitoring dinamisasi/kenaikan Pasal 25. Menghimbau KPP agar lebih selektif dan teliti dalam memproses permohonan pengurangan angsuran pasal 25;

3. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif ;
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP, baik yang ada di dafnom maupun dari luar dafnom

**4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Pribadi**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 106,16% | 117,01% | 117,01% | 119,44% | 119,44% | 121,57% | 121,57% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material mampu mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024

termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
    b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

**Formula**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan dan OP Strategis s.d. 31 Desember adalah sebanyak 409.507 SPT atau mencapai 121.57% dari target tahun 2024. Trajectory IKU s.d. triwulan IV 2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU sebesar 120%

| Unit Kerja | Badan | OPK | OPNK | SPT Masuk | WP Wajib SPT Tepat Waktu | WP Wajib SPT Terlambat | Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu | Bukan WP Wajib SPT Terlambat | Wajib SPT | Target SPT | Realisasi IKU | Trajektori | Capaian IKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=12/13 |
| **NASIONAL** | **1.115.438** | **12.173.059** | **2.134.543** | **15.423.040** | **9.913.918** | **1.455.416** | **3.200.590** | **853.116** | **19.273.366** | **16.038.802** | **108.52%** | **100.00%** | **108.52%** |
| 911 - KPP Pratama Mataram Barat | 3.714 | 37.242 | 4.232 | 45.188 | 34.489 | 2.326 | 7.406 | 967 | 50.979 | 43.303 | 120.28% | 100.00% | 120.00% |
| 912 - KPP Pratama Raba Bima | 1.754 | 28.781 | 4.180 | 34.715 | 20.012 | 996 | 10.280 | 3.427 | 36.273 | 29.753 | 130.13% | 100.00% | 120.00% |
| 913 - KPP Pratama Sumbawa Besar | 2.501 | 23.267 | 4.176 | 29.944 | 19.604 | 1.190 | 8.313 | 837 | 34.388 | 28.807 | 117.56% | 100.00% | 117.56% |
| 914 - KPP Pratama Mataram Timur | 2.836 | 27.890 | 5.290 | 36.016 | 23.920 | 1.022 | 9.687 | 1.387 | 38.219 | 32.544 | 125.37% | 100.00% | 120.00% |
| 915 - KPP Pratama Praya | 3.314 | 48.997 | 6.300 | 58.611 | 39.959 | 1.708 | 11.311 | 5.633 | 67.337 | 54.926 | 121.26% | 100.00% | 120.00% |
| 921 - KPP Pratama Maumere | 1.270 | 29.591 | 2.392 | 33.253 | 25.136 | 4.186 | 3.449 | 482 | 38.812 | 31.836 | 120.24% | 100.00% | 120.00% |
| 922 - KPP Pratama Kupang | 3.821 | 55.641 | 5.431 | 64.893 | 37.559 | 4.151 | 20.531 | 2.652 | 72.201 | 60.279 | 120.12% | 100.00% | 120.00% |
| 923 - KPP Pratama Ende | 963 | 20.887 | 2.605 | 24.455 | 18.672 | 1.000 | 4.359 | 424 | 28.246 | 23.357 | 120.69% | 100.00% | 120.00% |
| 924 - KPP Pratama Ruteng | 1.582 | 21.194 | 2.103 | 24.879 | 15.830 | 3.049 | 5.084 | 916 | 28.101 | 23.324 | 120.24% | 100.00% | 120.00% |
| 925 - KPP Pratama Atambua | 1.278 | 26.499 | 3.072 | 30.849 | 15.319 | 661 | 14.076 | 793 | 33.145 | 27.705 | 122.41% | 100.00% | 120.00% |
| 926 - KPP Pratama Waingapu | 1.478 | 23.108 | 2.118 | 26.704 | 20.257 | 2.251 | 3.848 | 348 | 30.719 | 25.556 | 120.35% | 100.00% | 120.00% |
| **290. Kanwil DJP Nusa Tenggara** | **24.511** | **343.097** | **41.899** | **409.507** | **270.757** | **22.540** | **98.344** | **17.866** | **458.420** | **381.390** | **121.57%** | **100.00%** | **120.00%** |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Pribadi | 86,43% | 102,94% | 106,85% | 102,26% | 121,57% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Tren Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan dan OP Strategis kenaikan dalam waktu lima tahun terakhir. dimana pada tahun 2020 86,43%, 2021 mencapai 102,94%, 2022 mencapai 106,85%, 2023 mencapai 102,26% dan 2024 mencapai 121,57%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Pribadi | - | 100,00% | 121,57% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Pribadi | 100,00% | - | 121,57% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Target SPT Tahunan untuk Tahun 2024 ditetapkan Kantor Pusat pada tgl 28 Februari 2024, dan sudah di distribusikan kepada KPP sesuai ND-1414/WPJ.31/2024. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja kepatuhan SPT secara berkala, dan melakukan diskusi dengan KPP tentang kendala yang dihadapai, dan langkah-langkah penanganannya.
2. Penyampaian Hasil Evaluasi Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2023 kepada seluruh KPP dan penyampaian data WP Wajib SPT Tahun 2023 yang belum lapor berdasarkan Jenis Wajib Pajak, KLU, dan Alamat sebagai salah satu sarana pemetaan untuk sasaran Wajib Pajak Lapor Tahun 2024 (ND dikirimkan ke masing-masing KPP)
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara one-on-one dengan KPP yang memperoleh capaian kepatuhan penyampaian SPT yang masih rendah atau belum mencapai 120%
4. Menghimbau KPP untuk melakukan cleansing data Wajib Pajak Non Efektif sebagai pengurang dalam perhitungan WP Wajib SPT
5. Bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan publikasi terkait kewajiban penyampaian SPT tahunan pada lokasi strategis
6. Menghimbau KPP untuk menyampaikan kewajiban SPT Tahunan melalui WhatsApp Group yang berjenjang dari pemerintah daerah hingga ke WhatsApp Group RT/RW

7. Menyelenggarakan Pojok Pajak dan asistensi SPT Tahunan berkolaborasi dengan KPP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Perhitungan IKU Kepatuhan tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pada 2024 dilakukan pembobotan sebesar 1,2 bagi WP Wajib SPT yang lapor tepat waktu. Oleh karena itu, Kanwil DJP Nusa Tenggara terus melakukan monitoring kepada KPP Pratama di wilayahnya untuk memaksimalkan periode bulan Januari s.d. April agar SPT Tahunan yang disampaikan bisa masuk secara signifikan pada periode tersebut.

  Hasilnya, pada periode Januari s.d Maret dan April (untuk Badan) SPT Tahunan yang masuk dan dianggap tepat waktu sebanyak 270.756 SPT dan SPT yang disampaikan setelahnya mencapai 138.751 SPT sehingga total SPT masuk sebanyak 409.507 dengan pencapaian realisasi sebesar 121,57%.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Monitoring dan evaluasi kepada KPP sering kali dilakukan melalui media daring menggunakan aplikasi Zoom atau teams. Selain menekan biaya perjalanan dinas, pemberian informasi dan pelaksanaan koordinasi juga menjadi lebih cepat dan dapat menjangkau sumber daya manusia (peserta/audiens) yg lebih banyak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Data Wajib SPT Tahun 2023 yang belum lapor berdasarkan Jenis Wajib Pajak, KLU, dan Alamat sebagai salah satu sarana pemetaan untuk sasaran Wajib Pajak Lapor Tahun 2024 menjadi alat bantu KPP dalam menentukan sasaran Wajib Pajak yang dapat diimbau untuk menyampaikan SPT Tahunan. Selain itu monitoring secara daring kepada KPP dilakukan dengan maksud agar informasi yang disampaikan lebih cepat dan efisien sehingga berdampak pada banyaknya SPT Tahunan tepat waktu yang disampaikan Wajib Pajak dalam mendukung pencapaian IKU Kepatuhan 100%

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- **Rencana aksi ke depan**

    1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja kepatuhan SPT secara berkala, dan melakukan diskusi dengan KPP tentang kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah penanganannya;
    2. Monitoring dan evaluasi atas penerbitan Himbauan, Teguran, dan STP atas Wajib Pajak yang belum/terlambat/tidak melaporkan SPT Tahunan; dan
    3. Melakukan penyesuaian target apabila jumlah Wajib SPT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
    4. Melakukan kolaborasi dengan Seksi Intelijen dalam hal Wajib Pajak tidak ditemukan/sulit dihubungi.
    5. Memberikan bimbingan ke KPP agar tetap memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan SPT Tahunan.
    6. Meminta KPP agar mengoptimalkan penggunaan layanan konsultasi Wajib Pajak melalui WhatsApp.
    7. Memfokuskan sosialisasi baik secara langsung, melalui surat, atau SMS Blast kepada Wajib Pajak yang agar melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 lebih awal.
    8. Gencar melakukan publikasi terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
    9. Menyampaikan kendala yang tejadi terutama EFIN ke KPDJP agar dapat diberikan solusi lain, dikarenakan wilayah kerja KPP yang luas dan kondisi geografis yang berpulau-pulau.
    10. Melakukan asistensi penerimaan SPT Tahunan secara intensif kepada KPP baik secara one-on-one atau monitoring keseluruhan.

5. **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 21,56% | 51,56% | 51,56% | 52,34% | 52,34% | 101,00% | 101,00% |
| Capaian | 86,24% | 103,12% | 103,12% | 69,79% | 69,79% | 101,00% | 101,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

| Formula | |
|---|---|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}$ | x 100% |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penerimaan PKM s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 615,67 Miliar atau mencapai 101,01% dari target PKM tahun 2024. Trajectory IKU s.d. triwulan IV-2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU sebesar 101,01%.

| Unit Kerja | Target | Realisasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | Capaian | Pertumbuhan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6=3-4)/3 |
| MATARAM BARAT | 136.027.411.000 | 136.148.042.211 | 63.032.313.224 | 100,09% | 116,00% |
| RABA BIMA | 44.002.563.000 | 44.033.364.324 | 22.496.928.082 | 100,07% | 95,73% |
| SUMBAWA BESAR | 44.035.434.000 | 44.624.274.663 | 41.491.545.527 | 101,34% | 7,55% |
| MATARAM TIMUR | 48.131.806.000 | 48.585.534.937 | 42.232.062.572 | 100,94% | 15,04% |
| PRAYA | 63.621.149.000 | 68.070.869.030 | 41.410.641.541 | 106,99% | 64,38% |
| MAUMERE | 30.592.447.000 | 30.596.169.984 | 26.330.448.390 | 100,01% | 16,20% |
| KUPANG | 135.513.050.000 | 135.747.273.131 | 106.780.470.528 | 100,17% | 27,13% |
| ENDE | 15.904.688.000 | 15.986.391.065 | 14.539.200.884 | 100,51% | 9,95% |
| RUTENG | 36.646.580.000 | 36.672.542.153 | 30.746.028.724 | 100,07% | 19,28% |
| ATAMBUA | 22.840.927.000 | 22.955.999.675 | 26.645.798.165 | 100,50% | -13,85% |
| WAINGAPU | 32.231.087.000 | 32.254.149.096 | 25.679.090.162 | 100,07% | 25,60% |
| **Grand Total** | **609.547.142.000** | **615.674.610.269** | **441.384.527.799** | **101,01%** | **39,49%** |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | - | 120,32% | 103,21% | 87,19% | 101,00% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Tren Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebagai berikut pada tahun 2021 mencapai 120,32%%, 2022 mencapai 103,21%, 2023 mencapai 87,19% dan 2024 mencapai 101,00%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00 | 100,00% | 100,00% | 101,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100 | 101,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan Adjusment DSP4 untuk DPP kolaboratif Semester II 2024 untuk WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan dan koordinasi secara aktif dengan KPP Pratama untuk pengamanan PKM Pengawasan.
  3. Melakukan monitoring atas tindak lanjut Penyelesaian P2DK baik DPP maupun Outstanding serta tindak lanjut data selain tahun berjalan.
  4. Mengolah dan menurunkan data untuk ditindaklanjuti sebagai WRA.
  5. Menyusun strategi Quick win fungsi pengawasan Tahun 2024

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penggalian potensi pajak belum dilakukan secara maksimal yang menyebabkan tidak meningkatnya basis penerimaan pajak.
2. Masih terdapat DPP yang belum dilanjutkan dengan LHPt
3. SP2DK Outstanding belum tindaklanjuti dengan LHP2DK
4. LHP2DK dalam pengawasan yang belum ditindaklanjuti dengan pembayar

5. Bahan baku PKM pengawasan yang belum mencukupi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    1. Pemantauan tindak lanjut atas Quick win KPDJP dan Kanwil
    2. Penurunan dan pemantauan atas data yang sudah diturunkan oleh Kanwil
    3. Asistensi dan pendampingan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak kewilayahan
    4. Pemantauan atas data yang belum ditindaklanjuti untuk dijadikan WRA oleh KPP
- **Rencana aksi ke depan**
    1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan tindak lanjut DPP pada Approweb maupun pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji secara aktif kepada KPP.
    2. Tetap melakukan Bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
    3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penggalian potensi dan pengawasan Wajib Pajak secara berkala.
    4. Monitoring atas tindak lanjut LHA yang telah disusun
    5. Pemantauan tindak lanjut atas Quick win KPDJP dan Kanwil.
    6. Penurunan dan pemantauan atas data yang sudah diturunkan oleh Kanwil.

7. Asistensi dan pendampingan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak kewilayahan.
8. Pemantauan atas data yang belum ditindaklanjuti untuk dijadikan WRA oleh KPP.

**6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 60,00% | 60,00% | 74,00% | 74,00% |
| Realisasi | 28,01% | 81,46% | 81,46% | 88,66% | 88,66% | 88,80% | 88,80% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan

pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

| **Formula:** |
|---|
| IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} |

- **Realisasi IKU**

**Data Unit Kerja**

| | Kode Unit | Nama Unit | Realisasi | | | | | | | Progress | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan | | Perubahan Perilaku | | | | Realisasi IKU | Capaian IKU | | | |
| | | | | | Lapor | | Bayar | | | | | | |
| | | | Capaian | Rasio (18,5%) | Capaian | Rasio (28,12%) | Capaian | Rasio (42,18%) | | s.d Q1 (10%) | s.d Q2 (40%) | s.d Q3 (60%) | s.d Q4 (74%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 290 | KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA | 100.00 % | 18.50 % | 81.55 % | 28.12 % | 70.44 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 911 | PRATAMA MATARAM BARAT | 100.00 % | 18.50 % | 105.45 % | 28.12 % | 45.45 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 912 | PRATAMA RABA BIMA | 100.00 % | 18.50 % | 69.15 % | 28.12 % | 101.06 % | 42.18 % | 88.80 % | 103.44 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 913 | PRATAMA SUMBAWA BESAR | 100.00 % | 18.50 % | 65.96 % | 28.12 % | 65.96 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 914 | PRATAMA MATARAM TIMUR | 100.00 % | 18.50 % | 82.45 % | 28.12 % | 50.53 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 915 | PRATAMA PRAYA | 100.00 % | 18.50 % | 120.00 % | 28.12 % | 120.00 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 921 | PRATAMA MAUMERE | 100.00 % | 18.50 % | 89.89 % | 28.12 % | 50.53 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 922 | PRATAMA KUPANG | 100.00 % | 18.50 % | 55.64 % | 28.12 % | 62.41 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 923 | PRATAMA ENDE | 100.00 % | 18.50 % | 60.64 % | 28.12 % | 57.98 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 924 | PRATAMA RUTENG | 100.00 % | 18.50 % | 91.49 % | 28.12 % | 63.30 % | 42.18 % | 88.80 % | 97.89 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 925 | PRATAMA ATAMBUA | 100.00 % | 18.50 % | 63.30 % | 28.12 % | 64.36 % | 42.18 % | 88.80 % | 116.65 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| | 926 | PRATAMA WAINGAPU | 100.00 % | 18.50 % | 96.28 % | 28.12 % | 47.87 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Kanwil DJP Nusa Tenggara tahun 2024 yaitu 88,80 sehingga capaiannya adalah 120%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 80,40% | 80,40% | 80,40% | 84,00% | 88,80% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Tren Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 mencapai 80,40% 2021 mencapai 80,40%, 2022 mencapai 80,40%, 2023 mencapai 80,40% dan 2024 mencapai 88,80%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | 74,00% | 88,80% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | - | 88,80% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Edukasi dengan peningkatan kepatuhan melalui perubahan perilaku dengan skala prioritas tax gap potensial sejalan dengan DSPT melalui pola *one on one* dan *one to many.*
2. Edukasi proses bisnis pemungutan/pemotongan pajak bagi Satker,SKPD dan Bank Mitra.
3. Edukasi bagi pelaku usaha real estate, retail, pergudangan, pedagang emas, tembakau, koperasi dan perhotelan.
4. Edukasi tematik : penunggak pajak, CTAS, Pemadanan NIK-NPWP.
5. Edukasi kepada PKP yang belum melakukan pemusatan PPN.
6. Edukasi bendahara desa dengan skala prioritas risiko tinggi.
7. Edukasi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi PNS dan pegawai BUMD #lebihawallebihnyaman #laporpajakhariini.
8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan edukasi peraturan terbaru.
9. Mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai bagian jaringan edukasi pajak dengan menggunakan informasi digital sebagai media edukasi.
10. IHT secara rutin unit vertikal kepada Fungsional Penyuluh dan petugas layanan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  rencana kerja penyuluhan telah menyesuaikan target wajib pajak dan materi yang akan disampaikan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  jumlah penyuluh sangat kurang dibandingkan dengan wajib pajak yang dilayani dan luasnya wilayah kerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Edukasi dengan peningkatan kepatuhan melalui perubahan perilaku dengan skala prioritas tax gap potensial sejalan dengan DSPT melalui pola *one on one* dan *one to many.*
2. Edukasi proses bisnis pemungutan/pemotongan pajak bagi Satker,SKPD dan Bank Mitra.
3. Edukasi bagi pelaku usaha real estate, retail, pergudangan, pedagang emas, tembakau, koperasi dan perhotelan.
4. Edukasi tematik : penunggak pajak, CTAS, Pemadanan NIK-NPWP.
5. Edukasi kepada PKP yang belum melakukan pemusatan PPN.
6. Edukasi bendahara desa dengan skala prioritas risiko tinggi.
7. Edukasi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi PNS dan pegawai BUMD #lebihawallebihnyaman #laporpajakhariini.
8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan edukasi peraturan terbaru.
9. Mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai bagian jaringan edukasi pajak dengan menggunakan informasi digital sebagai media edukasi.
10. IHT secara rutin unit vertikal kepada Fungsional Penyuluh dan petugas layanan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Edukasi dengan peningkatan kepatuhan melalui perubahan perilaku dengan skala prioritas tax gap potensial sejalan dengan DSPT melalui pola *one on one* dan *one to many.*
2. Edukasi proses bisnis pemungutan/pemotongan pajak bagi Satker,SKPD dan Bank Mitra.
3. Edukasi bagi pelaku usaha real estate, retail, pergudangan, pedagang emas, tembakau, koperasi dan perhotelan.
4. Edukasi tematik : penunggak pajak, CTAS, Pemadanan NIK-NPWP.
5. Edukasi kepada PKP yang belum melakukan pemusatan PPN.

6. Edukasi bendahara desa dengan skala prioritas risiko tinggi.
7. Edukasi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi PNS dan pegawai BUMD #lebihawallebihnyaman #laporpajakhariini.
8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan edukasi peraturan terbaru.
9. Mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai bagian jaringan edukasi pajak dengan menggunakan informasi digital sebagai media edukasi.
10. IHT secara rutin unit vertikal kepada Fungsional Penyuluh dan petugas layanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
    - kurangnya akses aplikasi sumber data (approweb, DMP, dll), kanwil telah memberikan suplai data
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mampu mendukung perluasan terkait manfaat pajak untuk mendukung program pemerintah
- **Rencana aksi ke depan**
    1. Edukasi dengan peningkatan kepatuhan melalui perubahan perilaku dengan skala prioritas tax gap potensial sejalan dengan DSPT melalui pola *one on one* dan *one to many.*
    2. Edukasi proses bisnis pemungutan/pemotongan pajak bagi Satker,SKPD dan Bank Mitra.
    3. Edukasi bagi pelaku usaha real estate, retail, pergudangan, pedagang emas, tembakau, koperasi dan perhotelan.
    4. Edukasi tematik : penunggak pajak, CTAS, Pemadanan NIK-NPWP.
    5. Edukasi kepada PKP yang belum melakukan pemusatan PPN.

6. Edukasi bendahara desa dengan skala prioritas risiko tinggi.
7. Edukasi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi PNS dan pegawai BUMD #lebihawallebihnyaman #laporpajakhariini.
8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan edukasi peraturan terbaru.
9. Mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai bagian jaringan edukasi pajak dengan menggunakan informasi digital sebagai media edukasi.
10. IHT secara rutin unit vertikal kepada Fungsional Penyuluh dan petugas layanan.

**7. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 85,00% | 100,00% | |
| Realisasi | 6,15% | 6,36% | 12,51% | 18,00% | 18,00% | 109,45% | 109,45% | |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 109,45% | |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya.

Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

| Formula: |
| --- |
| Indeks Hasil Survei |

- **Realisasi IKU**

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP Nusa Tenggara tahun 2024 realisasinya adalah 109,45% dengan capaian 109,45%.

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024**

| No | KANWIL/KPP | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | Nilai realisasi IKU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | KPP | | Kanwil | |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan | Indeks Efektivitas Penyuluhan | Indeks Efektivitas Kehumasan | Indeks KPP | Indeks Kanwil | Realisasi IKU KPP TW IV | Realisasi Y-2024 KPP | Realisasi IKU Kanwil TW IV | Realisasi Y-2024 Kanwil |
| KANWIL DJP NUSA TENGGARA | | 92.31 | 86.75 | 85.61 | | 88.22 | | | 91.45 | 109.45 |
| 257 | KPP PRATAMA ENDE | 92.27 | 87.68 | | 89.97 | | 93.27 | 111.27 | | |
| 258 | KPP PRATAMA RABA BIMA | 93.48 | 86.42 | | 89.95 | | 93.24 | 111.24 | | |
| 259 | KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR | 93.15 | 83.32 | | 88.24 | | 91.46 | 109.46 | | |
| 260 | KPP PRATAMA RUTENG | 90.53 | 88.08 | | 89.30 | | 92.57 | 110.57 | | |
| 261 | KPP PRATAMA MAUMERE | 92.62 | 85.50 | | 89.06 | | 92.32 | 110.32 | | |
| 262 | KPP PRATAMA ATAMBUA | 93.28 | 87.14 | | 90.21 | | 93.51 | 111.41 | | |
| 263 | KPP PRATAMA KUPANG | 90.64 | 82.94 | | 86.79 | | 89.97 | 107.97 | | |
| 264 | KPP PRATAMA MATARAM BARAT | 91.97 | 90.90 | | 91.43 | | 94.78 | 112.78 | | |
| 265 | KPP PRATAMA MATARAM TIMUR | 89.79 | 89.57 | | 89.68 | | 92.96 | 110.96 | | |
| 266 | KPP PRATAMA WAINGAPU | 92.18 | 89.20 | | 90.69 | | 94.01 | 112.01 | | |
| 267 | KPP PRATAMA PRAYA | 88.86 | 83.31 | | 86.08 | | 89.23 | 107.23 | | |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan | 88,97 | 87,68 | 89,32 | 83,93 | 109,45% |
| | | | | | |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan | 100% | 100% | 100,00% | 109,45% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan | 100,00% | - | 109,45% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Mengirimkan ND-919/WPJ.31/2024 terkait peningkatan layanan kehumasan di Kanwil DJP Nusa Tenggara
2. Memberikan bimbingan berupa asistensi dalam memilih dan memetakan Wajib Pajak yang koorperatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yang dirasa tepat untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei sejak awal tahun.
3. Melaksanakan IHT kepada KPP mengenai tata cara penyampaian survei kepada responden, memilih serta memetakan Wajib Pajak yang koorperatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yang dirasa tepat untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei sejak awal tahun kemudian mengirimkan daftar calon responden untuk survei triwulan IV (bobot 85%) minimal 15 calon responden yang koorperatif setiap bulannya
4. Mengirimkan contoh format leaflet berisi tagar kehumasan, media sosial, dan saluran pengaduan untuk disampaikan kepada wajib pajak setelah menerima layanan yang dapat digunakan KPP untuk meningkatkan nilai survei yang masih kurang.
5. Memberikan bimbingan berupa asistensi proses pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan peningkatan kualitas SDM ke KPP agar tetap memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak baik dalam pelayanan tatap muka maupun non tatap muka.
6. Melakukan monitoring atas tindak lanjut laporan SKM yang diterima tiap KPP.

7. Publikasi Pekan Panutan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
8. Publikasi Kegiatan Perpajakan di media massa, cetak dan media online.
9. Bersinergi dengan seluruh unit kerja untuk membuat citra positif DJP dengan berbagai pihak salah satunya menyelenggarakan Kampanye Simpatik Spectaxcular.
10. Mengoptimalkan fungsi tim penyuluhan, tidak hanya dilakukan oleh fungsional penyuluh tetapi memberdayakan petugas lainnya.IHT secara rutin unit vertikal kepada Fungsional Penyuluh dan petugas layanan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    1. Rendahnya perolehan survei triwulan IV dikarenakan adanya perbedaan pelaksanaan survei dibandingkan triwulan I-III. Pada triwulan I-III pelaksanaan Survei Efektivitas Penyuluhan dilaksanakan secara terpisah dengan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Kehumasan, yaitu dengan cara Wajib Pajak mengisi survei secara langsung setelah menerima layanan. Sedangkan pada triwulan IV pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggabung Survei Efektivitas Penyuluhan dan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Kehumasan menjadi satu. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai survei karena tidak seluruh responden yang disurvei oleh pihak ketiga menerima seluruh jenis layanan.
    2. Terdapat pertanyaan pada Survei Efektivitas Kehumasan triwulan IV yang kurang tepat untuk menilai indeks kehumasan dikarenakan kondisi demografi Wajib Pajak di NTB dan NTT yang sulit untuk mengakses informasi perpajakan secara daring dibandingkan dengan daerah perkotaan
- **Rencana aksi ke depan**
    1. Mencetak leaflet yang berisi tagar kehumasan, media sosial, dan saluran pengaduan yang disampaikan setelah wajib pajak selesai menerima layanan.

2. Melaksanakan IHT mengenai tata cara penyampaian survei kepada responden.
3. Publikasi Pekan Panutan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
4. Publikasi Kegiatan Perpajakan di media massa, cetak dan media online.
5. Bersinergi dengan seluruh unit kerja untuk membuat citra positif DJP dengan berbagai pihak salah satunya menyelenggarakan Kampanye Simpatik Spectaxcular.
6. asistensi proses pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan peningkatan kualitas SDM ke KPP agar tetap memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak baik dalam pelayanan tatap muka maupun non tatap muka.
7. Memberikan bimbingan berupa asistensi dalam memilih dan memetakan Wajib Pajak yang koorperatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yang dirasa tepat untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei sejak awal tahun.
8. Mengoptimalkan fungsi tim penyuluhan, tidak hanya dilakukan oleh fungsional penyuluh tetapi memberdayakan petugas lainnya.

**8. Persentase pengawasan pembayaran masa**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 117,60% | 117,60% | 118,96% | 118,96% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait

dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

| Formula: | | |
|---|---|---|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | = | (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)<br>+<br>(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 120,00%. Trajectory IKU 5a-CP s.d. triwulan IV-2024 adalah 90%, sehingga capaian IKU sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

| Unit Kerja | Realisasi Kegiatan PPM | | | Trajectory Q4 | Capaian IKU % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Strategis | Kewilayahan | TOTAL | | |
| A | B | C | D= (50%*B)+(50%*C) | E | F |
| MATARAM BARAT | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| RABA BIMA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| SUMBAWA BESAR | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| MATARAM TIMUR | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| PRAYA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| MAUMERE | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| KUPANG | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| ENDE | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| RUTENG | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| ATAMBUA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| WAINGAPU | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 90% | 120,00% |
| **KANWIL DJP NUSRA** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **90%** | **120,00%** |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | - | 100% | 109,62% | 120,00% | 118,96% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 90% | 90,00% | 118,96% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 100,00% | - | 118,96% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif kepada KPP di Wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas kinerja penerimaan, kepatuhan, dan pengawasan WP Kewilayahan dan WP Strategis.
3. Koordinasi penyunan dan menurunkan target komponen penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.
4. dMelakukan bimbingan dan adjusment terkait DSPE baik yang bersumber dari DSP4 maupun tambahan dari KPP.
5. Melakukan koordinasi dengan Dit EP dan KPP tentang permasalahan yang terjadi di KPP untuk mencari alternatif solusi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    1. Kepatuhan pembayaran wajib pajak per masa pajak belum optimal karena masih terdapat beberapa wajib pajak belum melakukan pembayaran per masa pajak secara rutin.
    2. Terkait dengan Sub IKU Dinamisasi Ps. 25, data pemicu yang diturunkan seringkali tidak material hanya bersifat formal seperti keterlambatan pembayaran angsuran PPh Ps 25 atau terlambat/salah setoran sehingga harus dilakukan Pemindahbukuan. Hal lain juga Data Pemicu yang diturunkan tidak stabil sehingga seringkali data pemicu yang akan ditindaklanjuti hilang begitu saja pada sistem.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas Pengawasan pembayaran masa yang Efektif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
    1. Melakukan tindak lanjut Data Perpajakan atas masa pajak tahun berjalan.
    2. Melakukan analisis terhadap laporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan untuk dilakukan peningkatan pembayaran Pajak Pasal 25.

3. Melakukan monitoring terhadap pembayaran pajak yang belum dilakukan pelaporan atau terlambat dibayarkan untuk dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif;
2. Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai yang ditampilkan di dashboard atau sistem;
3. Memberikan bimbingan dan adjusment atas DSPE Semester II;
4. Membantu mencari data untuk dijadikan Daftar Sasaran Ekstensifikasi melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.

**9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | N/A | 115,33% | 115,33% | 117,82% | 117,82% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | N/A | 115,33% | 115,33% | 117,82% | 117,82% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

| Formula: | | |
|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | = | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)<br>+<br>(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis | = | (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut) |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penyelesaian P4DK s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 120,00%. Trajectory IKU 6a-CP s.d. triwulan IV 2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU sebesar 120%.

| Unit Kerja | Realisasi P4DK | | | Trajectory Q4 | Capaian IKU % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Strategis (Maks. 120) | Kewilayahan (Maks. 120) | Total (Maks. 120) | | |
| A | B | C | D= (50%*B)+(50%*C) | E | F |
| MATARAM BARAT | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| RABA BIMA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| SUMBAWA BESAR | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| MATARAM TIMUR | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| PRAYA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| MAUMERE | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| KUPANG | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| ENDE | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| RUTENG | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| ATAMBUA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| WAINGAPU | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| **KANWIL DJP NUSRA** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **100%** | **120,00%** |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan | 119,59% | 120,00% | 117,25% | 120,00%% | 120,00% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan | 100% | 100% | 100,00% | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan | 100,00% | - | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan Adjusment DSP4 untuk DPP kolaboratif Semester II 2024 untuk WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dan WP Strategis
2. Melakukan forum pengawasan dan monitoring dan evaluasi serta bimbingan dan koordinasi secara aktif dengan KPP Pratama untuk pengamanan IKU P4DK.
3. Menyusun strategi pengawasan sampai dengan akhir tahun 2024 untuk kegiatan PKM.
4. Pengumpulan, pengolahan, dan penurunan data ke KPP untuk bahan baku DPP.

5. Membentuk tim Analisis Data Perpajakan (ADP) dengan melibatkan fungsional pemeriksa maupun penelaah keberatan yang bertugas membuat Laporan Hasil Analisis (LHA).
6. Menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA) berdasarkan Daftar Sasaran Analisa (DSA) dan dikirimkan ke KPP Pratama melalui Approweb dan Nadine.
7. Melakukan Bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
8. Pelaksanaan Uji Petik SP2DK yang belum ditindaklanjuti dengan LHP2DK .

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Terdapat beberapa KPP memiliki tindak lanjut P4DK yang tidak optimal, dikarenakan pemilihan DPP yang kurang maksimal dan terdapat KPP yang tidak patuh manajemen waktu penerbitan LHP2DK 14 hari sejak diterbitkan SP2DK dalam rangka berfokus pada penerimaan wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja pengujian kepatuhan material yang efektif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui IHT dan Bimtek sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Melakukan optimalisasi dengan pelaksanaan kegiatan Bedah Wajib Pajak atau Analisis Mandiri sebelum melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

    1. Pemantauan atas tindak lanjut *quick win* fungsi pengawasan;
    2. Optimalisasi pengawasan dan penggalian potensi sektoral terutama KLU Prioritas Kanwil ;
    3. Memberikan Bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak wilayah

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  pengujian kepatuhan material yang efektif dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

    1. Kendala kondisi ekonomi Wajib Pajak yang dapat diatasi dengan optimalisasi perencanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui *Flag Ability To Pay (ATP)*.
    2. Kendala terhadap kepatuhan pembayaran pajak atas Wajib Pajak yang terus berulan diawasi. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process)*

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Telah dilakukan berbagai upaya oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, adapun yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, dan analisa mandiri KPP secara aktif (aplikasi Approweb dan ManDor);
2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding yang ada saldo potensi pajak (aplikasi Approweb dan ManDor);
3. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding (aplikasi Approweb dan ManDor);
4. Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait penyelesaian permasalahan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding (aplikasi Approweb dan ManDor).
5. Melakukan Bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan
6. Pembentukan Komite Kepatuhan dengan KEP-246 /WPJ.31/2023 sebagai telah diubah dengan KEP-62/WPJ.31/2024;
7. Penerbitan ND-1413/WPJ.31/2024 hal Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan, dan Strategi Kebijakan Teknis ;
8. Menyelenggarakan rapat berkala untuk komite Kepatuhan Kanwil DJP Nusa Tenggara ;
9. Melakukan assessment terhadap usulan DSP4 Rekomendasi, dan DPP Mandatory;
10. Melakukan assessment terhadap Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan KPP, dan menyusun serta mengirikan laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan Kanwil (ND-4702/WPJ.31/2024 tanggal 29 Juli 2024);

11. Membentuk tim Analisis Data Perpajakan (ADP) dengan melibatkan fungsional pemeriksa, penilai, dan penyidik yang bertugas membuat Laporan Hasil Analisis (LHA).

12. Menerbitkan ND-4209/WPJ.31/2024 hal Permintaan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib KPP di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara Triwulan III Tahun 2024

**10. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 104,81% | 104,81% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 104,81% | 104,81% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.**Formula IKU**

| Formula: |
|---|
| **Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu**<br>= 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu s.d. TW IV Tahun 2024 adalah sebesar 120,00% sehingga capaiannya 120,00%.

| NAMA_KPP | PERIODE | KOMPONEN 1 (BOBOT 30%) | | | | KOMPONEN 2 (BOBOT 40%) | | | | | | | KOMPONEN 3 (BOBOT 30%) | | | REALISASI IKU EKWP (GABUNGAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POIN | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI | | | | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | |
| | | | | | | PENGAWASAN | PEMERIKSAAN | PENAGIHAN | GAKUM | | | | | | | |
| PRATAMA MATARAM BARAT | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 85,76% | 107,67% | 95,08% | | 96,17% | 80,00% | 120,00% | 174,07% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| PRATAMA RABA BIMA | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 81,14% | 117,98% | 103,95% | | 101,02% | 80,00% | 120,00% | 45,78% | 55,00% | 83,24% | **108,97%** |
| PRATAMA SUMBAWA BESAR | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 76,99% | 97,87% | 101,49% | | 92,12% | 80,00% | 115,15% | 640,68% | 55,00% | 120,00% | **118,06%** |
| PRATAMA MATARAM TIMUR | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 74,94% | 108,16% | 102,36% | | 95,15% | 80,00% | 118,94% | 66,57% | 55,00% | 120,00% | **119,58%** |
| PRATAMA PRAYA | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 89,99% | 120,00% | 99,06% | | 103,02% | 80,00% | 120,00% | 291,84% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| PRATAMA MAUMERE | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 85,84% | 120,00% | 88,33% | | 98,06% | 80,00% | 120,00% | 1911,27% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| PRATAMA KUPANG | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 82,13% | 108,66% | 105,51% | | 98,77% | 80,00% | 120,00% | 72,21% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| PRATAMA ENDE | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 80,83% | 86,21% | 97,56% | | 88,20% | 80,00% | 110,25% | 118,76% | 55,00% | 120,00% | **116,10%** |
| PRATAMA RUTENG | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 83,30% | 120,00% | 94,95% | | 99,42% | 80,00% | 120,00% | 100,00% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| PRATAMA ATAMBUA | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 87,26% | 110,45% | 87,75% | | 95,15% | 80,00% | 118,94% | 555,78% | 55,00% | 120,00% | **119,58%** |
| PRATAMA WAINGAPU | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 82,72% | 111,23% | 97,92% | | 97,29% | 80,00% | 120,00% | 82,67% | 55,00% | 120,00% | **120,00%** |
| **KANWIL DJP NUSRA** | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 82,81% | 117,73% | 99,09% | 108,93% | 102,14% | 80,00% | 120,00% | 97,20% | 55,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu | - | - | - | - | 120,00% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu hanya terdapat pada tahun 2024.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu | - | 100,00% | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu | 100,00% | - | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Telah dilakukan berbagai upaya oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, adapun yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, dan analisa mandiri KPP secara aktif (aplikasi Approweb dan ManDor);
2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding yang ada saldo potensi pajak (aplikasi Approweb dan ManDor);
3. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding (aplikasi Approweb dan ManDor);
4. Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait penyelesaian permasalahan tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding (aplikasi Approweb dan ManDor).
5. Melakukan Bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan

6. Pembentukan Komite Kepatuhan dengan KEP-246 /WPJ.31/2023 sebagai telah diubah dengan KEP-62/WPJ.31/2024;
7. Penerbitan ND-1413/WPJ.31/2024 hal Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan, dan Strategi Kebijakan Teknis ;
8. Menyelenggarakan rapat berkala untuk komite Kepatuhan Kanwil DJP Nusa Tenggara ;
9. Melakukan assessment terhadap usulan DSP4 Rekomendasi, dan DPP Mandatory;
10. Melakukan assessment terhadap Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan KPP, dan menyusun serta mengirikan laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan Kanwil (ND-4702/WPJ.31/2024 tanggal 29 Juli 2024);
11. Membentuk tim Analisis Data Perpajakan (ADP) dengan melibatkan fungsional pemeriksa, penilai, dan penyidik yang bertugas membuat Laporan Hasil Analisis (LHA).
12. Menerbitkan ND-4209/WPJ.31/2024 hal Permintaan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib KPP di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara Triwulan III Tahun 2024

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam perjalanan tahun kinerja 2024, ada bebeberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

  1. Penyampaian Laporan komite Kepatuhan tiap triwulan dapat disampaikan tepat waktu sehingga memperoleh poin maksimal;
  2. Kualitas Pelaksanaan komite kepatuhan di dorong peran maksimal dari setiap fungsi komite kepatuhan;
  3. Tercukupinya Bahan Baku Pemeriksaan terhadap pemeriksaan sehingga komponen capaian dapat terpenuhi.

- **Rencana aksi ke depan**

    1. Melakukan bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
    2. Menghimbau KPP untuk meningkatkan kegiatan bedah WP Strategis, visit dan KPDL, baik secara tersendiri (KPP) maupun kolaborasi dengan KPP lain & Kanwil untuk mendukung ketajaman data bahan DPP dan TL DPP;
    3. Kanwil DJP diberikan kewenangan yang lebih flexibel dalam melakukan asistensi dan pemantauan kegiatan KPP di proses bisnis pengawasan berdasarkan aturan dan berpegang pada target IKU.

11. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 91,76% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 91,76% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

- **Formula IKU**

| Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut: |
|---|
| $\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\textit{Trajectory}\text{ Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100\%)}}$<br>**) Capaian maksimal 120%* |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian s.d. TW IV Tahun 2024 adalah sebesar 120,00% sehingga capaiannya 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | - | 115,29% | 120,00% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | 100,00% | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100,00% | - | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melakukan bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
  2. Menghimbau KPP untuk meningkatkan kegiatan bedah WP Strategis, visit dan KPDL, baik secara tersendiri (KPP) maupun kolaborasi dengan KPP lain & Kanwil untuk mendukung ketajaman data bahan DPP dan TL DPP;
  3. Kanwil DJP diberikan kewenangan yang lebih flexibel dalam melakukan asistensi dan pemantauan kegiatan KPP di proses bisnis pengawasan berdasarkan aturan dan berpegang pada target IKU

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  1. Melakukan bimbingan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan secara umum dalam bentuk IHT/Sharing Session/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Account Representative dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
  2. Menghimbau KPP untuk meningkatkan kegiatan bedah WP Strategis, visit dan KPDL, baik secara tersendiri (KPP) maupun kolaborasi dengan KPP lain & Kanwil untuk mendukung ketajaman data bahan DPP dan TL DPP;

3. Kanwil DJP diberikan kewenangan yang lebih flexibel dalam melakukan asistensi dan pemantauan kegiatan KPP di proses bisnis pengawasan berdasarkan aturan dan berpegang pada target IKU

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Meningkatkan kualitas penyelesaian Pemeriksaan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Desentralisai komptensi Fungsional Pemeriksa Pajak melalui In House Training (IHT) dil ingkungan Kanwil DJP Nusra

**12. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 60,00% | 60,00% | 90,00% | 90,00% |
| Realisasi | 59,33% | 80,33% | 80,33% | 91,99% | 91,99% | 110,65% | 110,65% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

  1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;

3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;

4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;

5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

- **Formula IKU**

| Formula | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | | | | | | | | | | |
| 20%x | Realisasi Peneyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan / Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan | +25% x | Realisasi Penyidikan Telah Selesai / Target Penyidikan Telah Selesai | +20%x | Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD / Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD | +15% x | Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum / Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum | +20% x | (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC) / Target Tingkat Efektivitas Penagihan | |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi s.d. TW IV Tahun 2024 adalah sebesar 110,65% sehingga capaiannya 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi | 92,43% | 99,11% | 133,22% | 106,04% | 100,63% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

Tren Penerimaan pajak mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 mencapai 99,11%, 2022 mencapai 133,22%, 2023 mencapai 106,04% dan 2024 mencapai 100,63%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| | Dokumen Perencanaan | Kinerja |
|---|---|---|

| Nama IKU | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi | - | 90,00% | 110,65% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi | 90,00% | - | 110,65% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
2. Melakukan case building dan penyelesaian kolaborasi dan pemeriksaan bukti permulaan secara hybrid (luring dan daring) untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.
3. Percepatan pelaksanaan penyidikan melalui koordinasi intensif dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
4. Pelaksanaan IHT dan penyegaran ketentuan dari peraturan baru dalam berbagai kesempatan misal monev, rapat kerja bersama, atau forum lainnya.
5. Koordinasi intensif dengan AR/KPP, Bidang DP3, dan Direktorat Penegakan Hukum terkait penerimaan PKM Penegakan Hukum.

6. Asistensi terhadap Wajib Pajak yang membutuhkan eskalasi tingkat kanwil terkait penagihan.
7. Pengumpulan dan pemantauan data berkala terhadap Wajib Pajak Penunggak Besar dan tindakan penagihan terakhirnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    1. Monitoring dan evaluasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Nusa Tenggara dan terdapatnya bahan baku yang cukup secara kuantitas.
    2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Juru Sita Pajak Negara terkait kemajuan kinerja berupa pencairan piutang maupun tindakan penagihan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
    1. Koordinasi dengan internal Kanwil, KPP dan Direktorat Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Kolaborasi Penegakan Hukum, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Forensik Digital.
    2. Koordinasi dengan KPP terkait ketersedian sumber daya dalam hal membutuhkan bantuan dan/ atau asistensi penagihan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang tepat dan selektif dan paling utama adalah asistensi terhadap wajib pajak yang menurut KPP perlu bantuan dalam tindakan penagihan.

**13. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% | 86,50% |
| Realisasi | 98,98% | 99,05% | 99,05% | 99,22% | 99,22% | 99,30% | 99,30% |
| Capaian | 114,43% | 114,51% | 114,51% | 114,71% | 114,71% | 114,80% | 114,80% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan

II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

- **Formula IKU**

| Formula: |
|---|
| (Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%) |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu TW IV Tahun 2024 adalah sebesar 99,30% sehingga capaiannya 120,00%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu | - | - | - | - | 99,30% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu | | 100,00% | 99,30% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu | 86,50% | | 99,30% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

    1. Melakukan monitoring penyelesaian permohonan melalui fitur pada aplikasi e-portal KBP
    2. Mempercepat proses pengadministrasian dan penyelesaian permohonan melalui digitalisasi Surat Tugas, Matriks, Lembar Penelitian Formal, dan juga Laporan Penelitian.
    3. Peningkatan koordinasi antar Penelaah Keberatan dalam penyelesaian permohonan.
    4. Penyusunan timeline rencana penyelesaian keberatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Penyebab Keberhasilan :**

a. Keberhasilan dalam monitoring penyelesaian permohonan melalui fitur pada aplikasi e-portal KBP.
b. Keberhasilan dalam percepatan proses pengadministrasian dan penyelesaian permohonan melalui digitalisasi Surat Tugas, Matriks, Lembar Penelitian Formal, dan juga Laporan Penelitian.
c. Keberhasilan dalam meningkatkan koordinasi antar Penelaah Keberatan dalam penyelesaian permohonan.
d. Keberhasilan dalam penyusunan timeline rencana penyelesaian keberatan

**Penyebab Kegagalan :**

Keterlambatan dalam mengadministrasikan Surat Keputusan sehingga terlambat dalam pengiriman via Pos.

**14. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 63,00% | 63,00% | 63,00% | 63,00% | 63,00% | 63,00% | 63,00% |
| Realisasi | 79,65% | 96,61% | 96,61% | 97,30% | 97,30% | 97,20% | 97,20% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan

II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

- **Formula IKU**

| Formula: | | |
|---|---|---|
| **Komponen** | **Formula** | **Bobot** |
| I | **Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya**<br>$\frac{\text{Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya}}{\text{Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan}} \times 100\%$ | 80% |
| II | **Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak**<br>$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0{,}5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}\}}$ | 20% |

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penanganan upaya hukum yang efektif TW IV Tahun 2024 63,00% realisasi 97,20% sehingga capaiannya 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | - | - | - | - | 97,20% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | 45 | 45 | 63% | 97,20% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | 100,00% | - | 97,20% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  1. Lebih mendalami pembahasan dengan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat menerima keputusan yang ditetapkan pada SK Keberatan maupun Non Keberatan
  2. Memastikan proses Mengoptimalkan penanganan upaya hukum yang efektif dengan memperhatikan jangka waktu dan kualitas keputusan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Wajib Pajak tidak dapat menerima hasil keputusan setelah pembahasan upaya penanganan hukum, meskipun telah dijelaskan sesuai aturan yang berlaku.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  1. Melaksanakan Pembahasan penanganan upaya hukum dengan Fungsional Pemeriksa Pajak secara daring/online dengan tujuan efisiensi anggaran

2. Mendatangkan Wajib Pajak untuk melaksanakan pembahasan upaya hukum dengan tujuan efisiensi anggaran perjalanan dinas

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Mempelajari Keputusan Banding/Gugatan serupa dengan upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak
2. Mempelajari lebih lanjut mengenai Kapita Selekta

**15. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | |
| Realisasi | 111,85% | 99,23% | 99,23% | 130,79% | 130,79% | 120,00% | 120,00% | |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- **Formula IKU**

**Formula**

$$\frac{(\textit{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \textit{Persentase penyediaan data potensi perpajakan}}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 120%.Trajectory IKU 09a-N s.d. triwulan IV-2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU sebesar 120%

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | - | - | - | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | - | 100,00% | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | - | 120,00% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakanakhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

e. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

    1. Menyusun Daftar Sasaran Analisa untuk WP Kewilayahan dan telah membuat 29 LHA yang telah disampaikan ke KPP melalui approweb dan nadine.
    2. Koordinasi dengan ILAP untuk pengumpulan data eksternal, dan KPDL untuk data lapangan.
    3. Memberikan monitoring dan evaluasi serta bimbingan untuk kegiatan pengumpulan data lapangan menggunakan aplikasi Matoa.
    4. Melakukan bimbingan teknis pengumpulan data lapangan menggunakan aplikasi Matoa

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Data Bupot dari SPT Masa Unifikasi tidak muncul pada aplikasi approweb sehingga bupot PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang digunakan sebagai sumber data DSA WP tidak dapat dilihat. Aplikasi Matoa hanya dapat terinstall pada HP Android, sementara pegawai banyak yang menggunakan IOS. jika data yang dikumpulkan kurang valid atau tidak lengkap, hasil analisis bisa kurang optimal.

  Alternatif Solusi:

  Menjadwalkan pertemuan rutin untuk memastikan data eksternal dan data lapangan diperoleh secara lengkap dan berbobot.

  Data bupot SPT Masa Unifikasi dimunculkan pada aplikasi Approweb

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petugas lapangan sehingga lebih efektif dalam mengumpulkan data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  melaksanakan pembahasan dengan fungsional pemeriksa untuk membahas potensi pajak apa saja yang bisa di gali dari WP DSA

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Penyelesaian atas DSA yang belum diselesaikan
2. Menambah DSA untuk Wajib Pajak dengan tema lain sesuai KLU Prioritas Kanwil

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta bimbingan pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan menggunakan aplikasi Matoa ke KPP dan KP2KP.
4. Melakukan pengumpulan data baik internal, eksternal, maupun lapangan sebagai tambahan data untuk dilakukan analisa

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan lengkap dari Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang belum lapor SPT Tahunan.Kurangnya koordinasi antar unit terkait dalam proses tindak lanjut LHA.

  Langkah yang telah diambil:

  Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja yang terlibat terkait tindak lanjut LHA dan sosialisasi Kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

**16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 40,00% | 40,00% | 55,00% | 55,00% |
| Realisasi | 60,06% | 81,03% | 81,03% | 83,41% | 83,41% | 89,03% | 89,03% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

| Formula |
|---|
| $\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$ |

- **Realisasi IKU**

  Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 89,03%Trajectory IKU 9b-N s.d. triwulan IV 2024 adalah 55%, sehingga capaian IKU sebesar 120%

*Sumber: Appportal DJP diakses 16 Januari 2024*

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 75,51% | 89,03% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | 55,00% | 89,03% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | | 89,03% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Kanwil dan KPP mensosialisasikan manfaat PKS berupa pertukaran data dan diklat yang disediakan oleh pusdiklat pajak;
2. Berkoordinasi dengan ILAP terkait data yang belum diterima oleh Kanwil;
3. Berkoordinasi dengan KPP dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait data yang dimiliki;

4. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan PKS Tripartit terkait data dan kendala yang ada dan mencari solusi permasalahan terkait data tersebut;
5. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang telah setuju untuk melaksanakan PKS tripartid di tahun 2024;
6. Melakukan audiensi langsung terhadap pemda yang kesulitan/telat/terhambat dalam mengirimkan data.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    1. Pemda tidak segera mengirimkan data yang diminta (keterlambatan data);
    2. Terkait kerahasiaan data sehingga pemda tidak mengirimkan data yang diminta oleh Kanwil maupun KPP;
    3. Kelengkapan data yang dikirimkan;
    4. IKU sudah tercapai di tahun 2023, namun dari evaluasi sebelumnya banyak pemda yang belum mengirimkan data yang dibutuhkan, ketakutan lain yang muncul yaitu pemda yang lain akan meniru beberapa pemda yang belum mengirimkan data;
    5. Manfaat positif dari PKS tripartid yang belum sepenuhnya dipahami oleh Pemda.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    1. Pemerintah Daerah masih ragu dalam mengirimkan data karena tidak adanya keseimbangan/manfaat yang diberikan oleh DJP, meskipun di PKS sudah dijelaskan mekanisme DSPB, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut.
    2. Pengumpulan data belum maksimal karena data Pemda tersebar di berbagai OPD, dan peran UIC pengumpul data di Pemda belum maksimal.

3. Data NPWP dan NPWPD atau identitas pelaku usaha belum sinkron sehingga sulit melakukan matching untuk pertukaran data.
4. Struktur (elemen) atas jenis data yang dipertukarkan dalam PKS belum lengkap tersedia untuk dimanfaatkan dalam menggali potensi pajak.
5. Beberapa data yang dikirimkan masih terdapat dalam bentuk dokumen fisik/scan.
6. Dinamika mutasi pegawai yang in charge dalam program PKS sehingga menyulitkan koordinasi apabila ada pergantian peran.
7. Pemahaman mengenai data yang diminta oleh DJP kepada Pemda sehingga terdapat penundaan pengiriman data.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Koordinasi dengan KPP dalam mengimbau Pemda untuk segera mengirimkan data yang dibutuhkan.
2. Menyosialisasikan manfaat PKS kepada Pemda terkait pertukaran data.
3. Melalukan audiensi langsung kepada DPMPTSP, Bappenda, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM Prov. NTB.

**17. Tingkat kualitas Kompetensi SDM**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| Nama Unit | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
| Target | 15 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| Realisasi | 87,78 | 99,43 | 99,43 | 103,25 | 103,25 | 114,37 | 114,37 | |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu: Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai**.**

- **Formula IKU**

| Formula | |
|---|---|
| Tingkat Kualitas Kompetensi SDM | (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%) |

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Tingkat kualitas Kompetensi SDM s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar 114,37 Trajectory IKU 9b-N s.d. triwulan IV 2024 adalah 90%, sehingga capaian IKU sebesar 120%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat kualitas Kompetensi SDM | 92,43% | 99,11% | 133,22% | 106,04% | 100,63% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| | Dokumen Perencanaan | Kinerja |
|---|---|---|

| Nama IKU | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
|---|---|---|---|
| Tingkat kualitas Kompetensi SDM | 100 | 100,00% | 100,63% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat kualitas Kompetensi SDM | 100,00% | - | 100,63% |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

    1. Pemantauan dan rekapitulasi data capaian JP Pegawai secara berkala;
    2. Pengecekan hasil assessment per pegawai secara manual melalui aplikasi HRIS (bagi pegawai yang mengikuti assessment pada tahun berjalan);
    3. Segera melakukan update realisasi atas pemenuhan kompetensi pejabat struktural atas data realisasi yang dikirimkan oleh kantor pusat ke unit melalui Kepala Unit.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

    1. Pemantauan dan rekapitulasi data capaian JP Pegawai secara berkala;
    2. Pengecekan hasil assessment per pegawai secara manual melalui aplikasi HRIS (bagi pegawai yang mengikuti assessment pada tahun berjalan);
    3. Segera melakukan update realisasi atas pemenuhan kompetensi pejabat struktural atas data realisasi yang dikirimkan oleh kantor pusat ke unit melalui Kepala Unit.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan digitalisasi atas progres dan monitoring capaian organisasi dan SDM, sehingga kegiatan administrasi dan monitoring dapat dilakukan dengan efisien

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Program yang sudah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif adalah dengan disediakannya wadah bagi para pegawai untuk terus upgrade kemampuannya baik itu yang sejalan dengan kepentingan organisasi maupun pribadi, salah satunya dengan cara meminta para pegawai untuk mengusulkan pilihan PJJ atau Diklat yang ingin diikuti.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya berjalan dengan lancar dan secara konsisten terus dilakukan untuk menjaga performa setiap pegawai dalam memenuhi capaian JP masing-masing.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  1. Penyampaian hasil Assessment Pejabat Struktural yang dikirimkan secara periodik, bukan setiap selesai proses pelaksanaan Assessment per batch;
  2. Sinkronisasi capaian JP E-Learning dari StudiA ke SIKKA oleh sistem yang tidak diketahui waktu pastinya.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpiliuh maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU bisa dirasakan oleh semua pegawai karena sifatnya yang terbuka dan bisa diakses oleh masing-masing pegawai dan tidak memerlukan approval orang tertentu

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU bisa dirasakan oleh semua pegawai karena sifatnya yang terbuka dan bisa diakses oleh masing-masing pegawai dan tidak memerlukan approval orang tertentu

**18. Indeks Penilaian Integritas Unit**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | - | - | - | 85,00% | 85,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Realisasi | | | | 100,00% | 100,00% | 113,22% | 113,22% | |
| Capaian | N/A | N/A | N/A | 117,65% | 117,65% | 113,22% | 113,22% | |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

  1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
  2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- **Formula IKU**

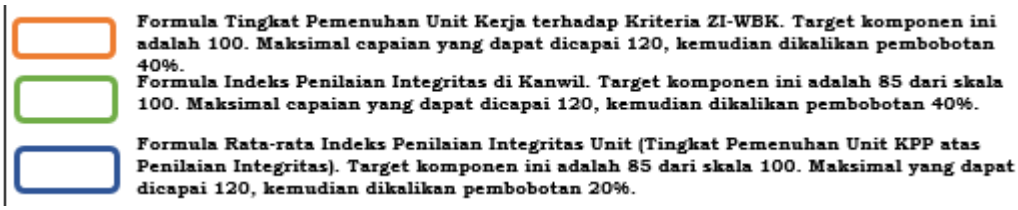


- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit s.d. TW IV adalah sebesar 113,22%. Trajectory IKU tersebut adalah 100,00%, sehingga capaian IKU sebesar 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | 118,81 | 113,00 | 111,93 | 113,22% |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | 100,00% | 113,22% |

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Mandor-DJP) Tahun 2024Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | 100,00% | - | 113,22% |

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Mandor-DJP) Tahun 2024*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  1. Memperketat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, selalu menanamkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan utamanya Nilai Integritas dalam setiap kesempatan dan melakukan pengembangan inovasi yang ada di unit kerja.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas tahapan penilaian pembangunan ZI menuju WBBM
  3. Mempersiapkan data longlist calon responden Survei Penilaian Integritas Unit

- **Rencana aksi ke depan**

  1. Melakukan pembahasan mengenai pengembangan inovasi, pelayanan yang ada di unit kerja untuk berkembang lebih baik pada saat mengikuti penilaian WBBM sembari terus menanamkan nilai Integritas kepada seluruh pegawai di unit kerja.
  2. Menghimbau kepada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI-WBBM agar memperlihatkan adanya perubahan konkret dalam tiap kegiatan yang direncanakan oleh *change agent.*
  3. Memilih dengan cermat responden yang mengajukan permohonan keberatan/pengurangan dikabulkan, memilih dengan cermat responden Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan

di KPP, Penagihan dengan tindak lanjut Wajib Pajak melakukan pembayaran.

**19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 23,00 | 47,00 | 47,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Realisasi | 28,91 | 47,52 | 47,52 | 77,88 | 77,88 | 97,49 | 97,49 | |
| Capaian | 120,00% | 101,11% | 101,11% | 111,26% | 111,26% | 108,32% | 108,32% | |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

  1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
  4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen

kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- **Formula IKU**

| Formula |
| --- |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko |

- **Realisasi IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. TW IV adalah sebesar 97,49 Trajectory IKU tersebut adalah 90,00 sehingga capaian IKU sebesar 108,32.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 97,65% | 99,87%% | 99,99% | 99,97%% | 97,49 |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | 90,00 | 97,49 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90,00 | - | 97,49 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Berkoordinasi dengan Bidang terkait dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko dan pelaksanaan Mitigasi Risiko;
2. Pembentukan PIC Manajamen Risiko Tahun 2024 dari setiap bidang/bagian;
3. Melaksanakan bimbingan teknis dan rapat dengan bidang pemilik proses bisnis dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024;
4. Melakukan permintaan realisasi mitigasi risiko dan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen RIsiko (LPMR) Triwulan I Tahun 2024;
5. Melakukan permintaan realisasi mitigasi risiko dan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen RIsiko (LPMR) Triwulan II Tahun 2024;
6. Melakukan permintaan realisasi mitigasi risiko dan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen RIsiko (LPMR) Triwulan III Tahun 2024;
7. Melaksanakan Addendum Piagam Manajemen Risiko menyesuaikan dengan Sasaran Organisasi 2024;
8. Melaksanakan DRKO dengan KPP pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 sesuai petunjuk DKO pada KMK-300/KMK.01/2022 dan Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-2496/PJ.11/2024 perihal Perubahan Pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024;

9. Dalam mencapai keseragaman pelaporan NKO antara Kanwil dan KPP dilakukan pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan yang akan berdampak terhadap strategi secara musyawarah mufakat;
10. Permintaan data capaian kinerja dan laporan penjelasa progres IKU kepada seluruh bidang/bagian pengampu IKU di Kanwil dan kepada Kepala KPP Pratama untuk NKO KPP di Lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara;
11. Kegiatan DKRO Triwulan I, II, III dan IV telah terintegrasi dengan Pembahasan Mitigasi Risiko untuk Triwulan yang sama.

- **Rencana aksi ke depan**

1. Melaksanakan DKRO sesuai dengan KMK-300/KMK.01/2022 Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-2496/PJ.11/2024 dengan tepat sasaran dan efisien sehingga diharapkan memperoleh poin-poin umpan balik yang sempurna, serta memperhatikan ketepatan waktu.
2. Melaksanakan DKRO Triwulan berikutnya dan seterusnya dengan terintegrasi Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko Kanwil

**20. Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | S1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 105,24 | 105,03 | 105,03 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 105,24% | 105,03% | 105,03% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

*Sumber: Laporan capaian NKO Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

| **Formula** |
|---|
| Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). |
| **Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0** |

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran s.d. TW IV adalah sebesar 120,00  Trajectory IKU tersebut adalah 100,00 sehingga capaian IKU sebesar 120,00

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95,55% | 98,65% | 99,51% | 99,86 | 120,00 |

*Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020 s.d. 2023 dan Aplikasi Mandor DJP Tahun 2024*

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | Kinerja | |
|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100,00 | 120,00 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | - | 120,00 |

*Sumber: Mandor-DJP Tahun 2024*

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Telah dilaksanakan rapat pembahasan anggaran kepada seluruh bidang untuk dapat merencanakan penggunaan anggaran perjalanan dinas secara optimal dengan tetap mengupayakan kepentingan setiap masing-masing perjalanan dinas

- **Rencana aksi ke depan**

  Dilakukan adjustment oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama seluruh bidang/bagian terkait untuk menyusun rencana dan kebijakan terkait permasalahan teser

## II. Realisasi Anggaran

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan bersumber dari dana DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana Rp13.527.438.000,- dan yang direalisasikan sebesar Rp13.015.706.342,- dan telah dilakukan secara efisien dengan data sebagai berikut:

| No | Jenis Belanja | PAGU | REALISASI | % | SISA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 1,009,768,000 | 980,468,000 | 97.10 | 29,300,000 |
| 2 | Belanja Barang | 10,202,733,000 | 9,742,577,606 | 95.49 | 460,155,394 |
| 3 | Belanja Modal | 2,314,937,000 | 2,292,660,736 | 99.04 | 22,276,264 |
| | **JUMLAH** | **13,527,438,000** | **13,015,706,342** | **96.22** | **511,731,658** |

*Sumber: Data Subbagian Keuangan*

Apabila penerimaan pajak merupakan tugas utama Direktorat Jenderal Pajak secara operasional, maka secara organisasi salah satu tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah merealisasikan kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan pengalokasian dananya dalam APBN 2024.

Berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sepanjang tahun 2024, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan belanja modal baik pada Kanwil DJP Nusa Tenggara maupun unit kerja dibawahnya yaitu KPP Pratama.

Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran atas pagu kegiatan dalam DIPA Tahun 2024 di atas, seluruh kegiatan yang telah direncanakan tersebut pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian penyerapan anggaran yang akuntabel akan terus diupayakan secara maksimal.

**III. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2024, organisasi kami telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam berbagai aspek guna mencapai hasil yang optimal. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi:

1. Efisiensi Anggaran

   Kami berhasil mengoptimalkan alokasi anggaran dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap prioritas pengeluaran. Pemangkasan biaya operasional yang tidak efisien dan penggunaan anggaran berbasis kinerja telah membawa dampak signifikan terhadap penghematan tanpa mengurangi kualitas layanan.

2. Sumber Daya Manusia

   Dalam hal sumber daya manusia, kami fokus pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, kami memperkenalkan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan berbasis hasil, memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Efisiensi Organisasi

   Struktur organisasi kami ditata ulang untuk meningkatkan koordinasi antar bagian/bidang dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

4. Pemanfaatan Aset

lebih cermat dalam mengelola aset yang ada, dengan melakukan pemeliharaan rutin dan optimalisasi penggunaan fasilitas serta peralatan. Beberapa aset yang sebelumnya tidak maksimal digunakan kini dimanfaatkan lebih efisien, memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan penghematan biaya.

5. Teknologi Informasi

   Penggunaan teknologi informasi juga mengalami efisiensi yang signifikan. Kami mengintegrasikan sistem manajemen untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Selain itu, penerapan otomasi dalam beberapa proses administratif membantu mengurangi beban kerja manual, meningkatkan kecepatan operasional, dan meminimalkan risiko kesalahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara mampu mencapai efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan berbagai sumber daya, yang pada akhirnya mendukung kinerja dan daya saing organisasi secara keseluruhan.

## IV. Kinerja Lain-Lain

Penghargaan yang telah dicapai selama tahun 2024 oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara yaitu:

1. Peringkat Pertama Kanwil DJP dengan Kreator Konten Teraktif Tahun 2024.
2. Juara Kedua Olimpiade Hakordia 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Peringkat Ketiga Konten Unit Vertikal Terviral di Media Sosial Instragram @DitjenPajakRI Tahun 2024.
4. Nilai Kinerja Organisasi yang diperoleh Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun 2024 mencapai 110,63.

Inovasi-inovasi Kanwil DJP Nusa Tenggara sampai dengan Tahun 2024 diantaranya:

1. Pemeringkatan Account Representative

Kegiatan pengawasan pajak dilaksanakan oleh Account Representative (AR), artinya AR memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan pajak. Sebagai sarana evaluasi dan meningkatkan kinerja AR di KPP, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan evaluasi secara detail atas kinerja AR dan diperingkatkan sesuai kinerja AR untuk meningkatkan semangat AR dalam melaksanakan tugasnya.

2. Penambahan menu Monitoring Data ILAP di Aplikasi Engine290

   Pada tahun 2022 dilakukan inovasi yaitu penambahan menu monitoring Data ILAP di aplikasi Engine290. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan dalam melakukan monitoring atas pengumpulan data ILAP dari setiap Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerja KPP, kinerja pengolahan data, dan juga pengiriman data hasil pengolahan data eksternal baik ke KPP maupun ke DIP.

3. Pembentukan Tim Data ILAP Kanwil DJP Nusa Tenggara

   Sesuai dengan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan, terdapat 7 (tujuh) jenis data yang wajib diberikan oleh setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 19 (sembilan belas) jenis data yang wajib diberikan oleh setiap Pemerintah Provinsi. Sehingga sebanyak 228 data yang harus diminta dan dikumpulkan dari seluruh pemerintah daerah dil wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara. Karena wilayah kerja yang sangat luas dan kendala transportasi, maka diciptakan inovasi berupa pembentukan Tim Data ILAP Kanwil DJP Nusa Tenggara yang beranggotakan pegawai di Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan juga Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) di KPP lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara agar memudahkan koordinasi dan pengumpulan data dari setiap kabupaten/kota sesuai wilayah kerja KPP.

4. Inovasi Menu Data ILAP Pada Modul Smarter *Database*

   Sesuai ketentuan dalam PMK 228 Tahun 2017 Terdapat 19 jenis data dari Pemerintah Provinsi dan 7 jenis data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dilakukan permintaan dan pengumpulan oleh masingmasing Kanwil

DJP. Selain data yang wajib/mandatory tersebut, Kanwil dan KPP juga dapat melakukan kegiatan permintaan atau pengumpulan data lain sesuai kebutuhan masingmasing unit kerja.Menghadapi Jenis dan Jumlah Data yang sangat banyak dan terus bertambah setiap masanya, maka diperlukan sebuah wadah atau aplikasi yang dapat mengorganisir seluruh data dari pihak eksternal yang telah diterima baik dari Kanwil atau KPP Pratama, yaitu Menu Data ILAP pada Smarter Database.

5. Inovasi NITA (Aplikasi Analisis Sentimen Berita)

   Berita yang beredar memiliki sentimennya masing-masing baik positif maupun negatif, akan tetapi untuk mengetahui sentimen tersebut tiap orang harus membaca secara manual berita tersebut sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Banyak berita yang tersebar memiliki citra sentimen negatif untuk dibaca masyarakat sehingga dapat menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang terdapat berita dengan sentimen negatif tersebut. Untuk mengawasi dan memonitoring hal tersebut Kanwil DJP Nusa Tenggara menciptakan aplikasi yang dapat mencari serta menganalisa sentimen berita khususnya berita perpajakan yang dinamakan Aplikasi NITA (Analisis Sentimen Berita).

6. Inovasi E-Portal KBP

   Dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelesaian permohona upaya hukum di tingkat Kantor Wilayah sesuai dengan Praturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan (Bidang KBP) menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang KBP merasa perlu untuk mempunyai portal perencanaan, penyelesaian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas. Dengan portal ini, diharapkan Bidang KBP dapat senantiasa melakukan perbaikan dan pelayanan prima kepada

Wajib Pajak. Maka dari itu, dibuat satu aplikasi berbasis web untuk menaungi sebagian besar tugas dan fungsi Bidang KBP dalam hal ini penyelesaian permohonan upaya hukum perpajakan.

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kontrak kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Kementerian Keuangan. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya diatas 100%.

Berdasarkan hal tersebut upaya pengamanan penerimaan pajak dan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi yang baik akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun baik dari intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan supaya target peneriman pajak bisa tercapai.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Mataram, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara

Ditandatangani secara elektronik
Samingun

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara

Tahun Anggaran : 2024

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100,63% | 100,63 |
| | | 1b-N | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100% | 104,92 | 104,92 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100,60% | 100,60 |
| | | 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | 121,57% | 120,00 |
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 101,00% | 101,00 |
| 4. | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif | 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | 80,80% | 120,00 |
| | | 4b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan | 100% | 109,45% | 109,45 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 118,96% | 120,00 |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Pengawasan kepatuhan material yang efektif | 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 120,00% | 120,00 |
| | | 6b-N | Persentase Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu | 100% | 120,00% | 120,00 |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% | 120,00% | 120,00 |
| | | 7b-CP | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi | 90% | 110,65% | 120,00 |
| 8. | Penanganan Upaya Hukum yang efektif | 8a-CP | Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu | 86,50% | 99,30% | 114,80 |
| | | 8b-N | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif | 63% | 97,20% | 120,00 |
| 9. | Data dan Informasi yang berkualitas | 9a-N | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% | 120,00% | 120,00 |
| | | 9b-N | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% | 89,03% | 120,00 |
| 10. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 10a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM | 90,00 | 114,37 | 120,00 |
| | | 10b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 100% | 113,22% | 113,22 |
| | | 10c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90 | 97,49 | 108,32 |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 120,00 | 120,00 |
| **Nilai Kinerja Organisasi** | | | | | | **110,63** |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 13.527.438.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 13.015.706.342,-